

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Awal munculnya ide untuk melakukan perdagangan ke luar negeri adalah karena para pedagang merasa pasar dalam negeri tidak lagi menjanjikan keuntungan yang tinggi, sedangkan pasar luar negeri terbuka sangat lebar. Hal tersebut memicu terjadinya perdagangan bebas, dimana batas-batas negara dan perbedaan kebudayaan tidak lagi menjadi hambatan. Kecenderungan meningkatnya globalisasi di bidang ekonomi semakin tampak dengan adanya kesepakatan-kesepakatan antar beberapa negara dalam region tertentu untuk bergabung dalam sebuah organisasi yang berorientasi ekonomi seperti Uni Eropa (EU), AFTA, dan NAFTA.

Selain itu, globalisasi di bidang ekonomi juga tampak dengan munculnya fenomena krisis nilai tukar di sebagian negara Asia, termasuk Indonesia, yang dimulai pada tahun 1997. Industri yang bergantung kuat pada bahan baku impor sangat berpengaruh dengan kondisi ini. Nilai impor bahan baku dalam mata uang domestik, dalam hal ini rupiah, meningkat tajam. Industri yang bergantung kuat pada bahan baku dan sumber daya domestik mengalami hal yang sebaliknya. Penjualan barang ke luar negeri menjadi sangat menguntungkan jika dinilai dalam mata uang domestik. Penetapan harga jual baru di pasar domestik dan luar negeri menjadi tidak sederhana sebelum terjadi krisis (Sadjiarto, 1999).

Perkembangan selanjutnya di Indonesia juga menunjukkan fenomena yang menarik. Melemahnya rupiah terhadap mata uang asing, meskipun tidak kembali pada kurs nilai tukar sebelum terjadinya krisis, membuat naiknya pendapatan para eksportir jika dinilai dalam mata uang domestik. Sebaliknya terjadi bagi para importir. Melemahnya mata uang rupiah terhadap mata uang asing (dolar Amerika Serikat) membuat kewajiban importir membayar dalam mata uang asing menjadi lebih mahal dinilai dari mata uang domestik.

Hal ini pada akhirnya memacu para pengusaha untuk mengembangkan bisnisnya di luar negeri, melintasi batas-batas negara dan budaya, dalam rangka mencari keuntungan sebesar-besarnya sekaligus memperluas daerah pemasaran. Para pengusaha luar negeri ini membuka cabang perusahaan di negara lain dengan nama yang sama dengan induk perusahaan. Perusahaan seperti ini disebut *Multinational Corporation* (MNC). Menurut Sadjarto (1999), MNC adalah perusahaan yang melakukan kegiatan ekspor maupun impor atau melakukan ekspansi ke negara lain dalam rangka pengembangan perusahaan baik berupa lisensi produk maupun mendirikan anak perusahaan di negara lain. Ekspor diartikan sebagai penjualan ke luar negeri dan dimulai saat perusahaan penjual domestik mendapatkan order pembelian dari perusahaan pembeli asing. *Packaging* produk yang diproduksi oleh sebuah MNC dapat dibuat sama dan mirip dengan perusahaan induknya, maupun agak sedikit dibedakan mengingat perbedaan kondisi di tiap-tiap negara. Yang menjadi

acuan berhasil tidaknya ekspansi bisnis ini, dilihat dari laporan keuangan yang dihasilkan. Apakah kegiatan usahanya mengalami keuntungan atau kerugian. Dari sini kemudian dikembangkan keputusan-keputusan manajerial menyangkut kelangsungan hidup perusahaan tersebut, dimana keputusan ini memiliki informasi yang salah satunya didapat dari kerangka akuntansi.

Akuntansi sebagai penyedia informasi bagi pengambil keputusan yang bersifat ekonomi juga dipengaruhi oleh lingkungan bisnis yang terus-menerus berubah karena adanya globalisasi, baik lingkungan bisnis yang bertumbuh bagus, dalam keadaan stagnasi maupun depresi. Tiap-tiap negara tentu saja mempunyai standar akuntansi yang berbeda dengan negara lain. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor antara lain kondisi ekonomi, paham ekonomi yang dianut, serta perbedaan kondisi politik dan sosial di tiap-tiap negara. Dengan keadaan yang seperti ini, tentu saja laporan akuntansi pada perusahaan di masing-masing negara juga berbeda (Sadjiarto, 1999).

Adanya transaksi antar negara dan prinsip-prinsip akuntansi yang berbeda antar negara mengakibatkan munculnya kebutuhan akan standar akuntansi yang berlaku secara internasional. Oleh karena itu muncul organisasi yang bernama IASB atau *International Accounting Standar Board* yang mengeluarkan *International Financial Report Standar (IFRS)*. IFRS kemudian dijadikan sebagai pedoman penyajian laporan keuangan di berbagai negara. Indonesia direncanakan akan mengadopsi penuh IFRS

pada tahun 2012 nanti. Menurut Ketua Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) tujuan konvergensi IFRS ini adalah agar laporan keuangan yang berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) tidak memerlukan rekonsiliasi dengan laporan berdasarkan standar internasional (Harian Berita Sore, 2009). Masalah yang selanjutnya muncul adalah bagaimana penerapan IFRS di masing-masing negara mengingat perbedaan lingkungan ekonomi, politik, hukum, dan sosial.

Lingkungan adalah salah satu isu utama dalam masyarakat dan menjadi bagian yang signifikan dalam pengaruhnya terhadap perekonomian suatu negara. Alasan utama penyajian laporan keuangan yang memenuhi standar adalah untuk kelangsungan hidup perusahaan itu sendiri di masa depan, baik ditinjau dari segi pengguna internal maupun pengguna eksternal. Pengakuan publik akan kelengkapan dan ketransparanan laporan keuangan sebuah perseroan terbuka meningkatkan tekanan sektor bisnis untuk menyediakan laporan keuangan yang *compatible* dan sesuai standar (Immanuela, 2007).

Masalah penting dalam profesi akuntansi dan semua pemakai laporan keuangan adalah standar akuntansi yang berkualitas. Saito dan Mayangsari (2010) menyatakan bahwa standar akuntansi yang berkualitas akan mempengaruhi kualitas dari laporan keuangan perusahaan. Penerapan standar akuntansi yang berkualitas dengan baik akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas pula. Dengan demikian, standar akuntansi

memiliki peranan penting bagi pihak penyusun dan semua pemakai laporan keuangan agar timbul keseragaman atau kesamaan interpretasi atas informasi yang terdapat dalam laporan keuangan (Chariri, 2009).

Penelitian yang dilakukan Sadjiarto (1999) menghasilkan temuan bahwa karena faktor-faktor tertentu yang khusus di suatu negara, membuat masih diperlukannya standar akuntansi nasional yang berlaku di negara tersebut. Misalnya standar akuntansi keuangan Indonesia (SAK) dibandingkan dengan standar akuntansi keuangan Amerika Serikat. Dalam SAK terdapat Akuntansi untuk Perkoperasian yang belum tentu dibutuhkan di Amerika Serikat. Berdasarkan hal ini, kecil kemungkinan untuk membuat suatu standar akuntansi internasional yang lengkap dan komprehensif.

Konsep yang ternyata lebih populer dibandingkan standarisasi untuk menjembatani berbagai macam standar akuntansi di berbagai negara adalah konsep harmonisasi. Sadjiarto (1999) menyatakan bahwa harmonisasi standar akuntansi diartikan sebagai meminimumkan adanya perbedaan standar akuntansi di berbagai negara. Harmonisasi juga dapat diartikan sebagai sekelompok negara yang menyepakati suatu standar akuntansi yang mirip, namun mengharuskan adanya pelaksanaan yang tidak mengikuti standar harus diungkapkan dan direkonsiliasi dengan standar yang disepakati bersama. Beberapa pihak yang diuntungkan dengan adanya harmonisasi ini adalah MNC, kantor akuntan internasional,

organisasi perdagangan, serta IOSCO (International Organization of Securities Commissions).

Kesimpulan penelitian tersebut adalah dunia internasional masih belum dapat menerima adanya standar akuntansi yang berlaku secara universal karena banyaknya perbedaan di tiap-tiap negara yang disebabkan oleh faktor ekonomi, politik, hukum, dan sosial. Sebagai ganti dari standarisasi sistem akuntansi yang berlaku global, muncul konsep harmonisasi standar akuntansi, dimana negara yang bersangkutan mengadopsi standar akuntansi internasional yang sesuai dengan kondisi negaranya dan tetap mempertahankan standar akuntansi nasional untuk transaksi-transaksi tertentu namun transaksi tersebut harus diungkapkan dan direkonsiliasi dengan standar yang telah diadopsi.

Penelitian tentang adopsi IFRS juga dilakukan oleh negara-negara selain Indonesia, misalnya penelitian tentang adopsi IFRS yang terjadi di Banglades oleh Mir dan Rahaman (2004). Dalam penelitian tersebut, masalah yang diangkat peneliti adalah apakah IFRS yang cenderung berorientasi pada standar akuntansi negara maju (*western*), cocok diterapkan di negara berkembang, terutama Banglades. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa negara berkembang belum siap melakukan standarisasi IFRS (*full adoption*) karena berbagai alasan. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sadjarto (1999) yang menyatakan bahwa standarisasi belum dapat diterapkan di beberapa negara karena banyaknya

perbedaan di tiap-tiap negara dan sebagai gantinya yang dilakukan untuk menangani masalah tersebut adalah harmonisasi IFRS.

Dari hasil penelitian Mir dan Rahaman (2004) dapat diketahui bahwa pihak yang paling berpengaruh dalam adopsi IFRS di negara-negara berkembang adalah kreditor seperti *World Bank* dan IMF (*International Money Fund*). Badan-badan tersebut yang menekan pemerintah negara berkembang, terutama Banglades, untuk mengadopsi IFRS agar memudahkan mereka untuk menginterpretasikan laporan keuangan negara tersebut. Karena alasan ini, pemerintah Banglades melakukan adopsi IFRS yang cukup instan yang akhirnya membawa dampak buruk bagi perkembangan standar akuntansi di negara tersebut. Lebih lanjut, peneliti memberikan saran kepada pemerintah Banglades bagaimana cara mengadopsi IFRS secara tepat sehingga mendatangkan keuntungan bagi negara itu, bukan malah sebaliknya.

Bastian (2011) menyatakan bahwa konvergensi terhadap *International Financial Reporting Standards* (IFRS) membawa dampak yang luas terhadap pengembangan akuntansi di Indonesia, baik secara praktik maupun akademik. Konvergensi ini mempengaruhi pembelajaran teori akuntansi di Indonesia yang berdampak pada perubahan dalam penyusunan laporan keuangan entitas. Sementara Sun dan Soderstrom (2008) mengungkapkan pula konvergensi IFRS membawa dampak tersendiri, terutama pada kualitas standar akuntansi dikarenakan perbedaan bahasa.

Penelitian tentang standar akuntansi masih jarang dilakukan, terutama dari segi kualitas. Selama ini penelitian mengenai standar akuntansi lebih menyorot kepada proses perumusan standar akuntansi (*standards setting*) dan adopsi IFRS (lihat misalnya Chen 2009; Fearnley dan Hines 2002; Jacob dan Madu 2008; Mir dan Rahaman 2003; Susela 1999). Oleh karena itu penelitian lebih lanjut mengenai kualitas standar akuntansi perlu dilakukan karena masih ada beberapa standar akuntansi yang kurang berkualitas dari aspek isi (*content*) dan bahasa. Standar akuntansi yang kurang berkualitas ditunjukkan dengan bahasa yang sulit dipahami oleh pemakai standar akuntansi (SEC dalam Kusuma, 2010). Sementara Rogero (1998) menyatakan bahwa karakteristik standar akuntansi yang berkualitas ditentukan oleh isi (*content*) standar tersebut.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada akhir Desember 2006 telah menerbitkan PSAK No. 55 (Revisi 2006) tentang pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan serta beberapa standar akuntansi lain. Bastian (2011) menyatakan bahwa dominasi para praktisi yang tergabung dalam Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) membuat adaptasi IFRS hampir tanpa filter. Di sisi lain, kendala perbedaan bahasa dan interpretasi pada berbagai standar akuntansi juga menjadi masalah penting dan tantangan tersendiri di Indonesia. PSAK No. 55 (Revisi 2006) merupakan standar akuntansi yang kompleks karena bahasa yang digunakan sulit dipahami padahal mengakomodasi kebutuhan pengaturan instrumen keuangan yang berkembang pesat (Boediono dalam Kusuma, 2010). PSAK No. 55

(Revisi 2006) tergolong masih baru dan bahasa dalam PSAK No. 55 (Revisi 2006) belum dipahami oleh sebagian badan usaha. Hal ini dibuktikan dari pengamatan Dewan dalam melaksanakan sosialisasi atas PSAK No. 55 (Revisi 2006), beberapa badan usaha memohon penundaan tanggal efektif PSAK No. 55 (Revisi 2006) untuk mempelajari, memahami dan menerapkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam pada transaksi perusahaan (IAI, 2007).

Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa akuntansi S1 yang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Muhammadiyah di Daerah Istimewa Yogyakarta karena mahasiswa akuntansi sebagai calon akuntan, praktisi dan professional dituntut memiliki pemahaman mengenai PSAK. Penggunaan mahasiswa sebagai sampel dalam beberapa penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa dapat menggambarkan kondisi aktual sehingga dapat digunakan sebagai proxy pelaku bisnis dan profesi (Ugrin 2008). Belski, Beams dan Brozovsky (2008) juga mengatakan bahwa mahasiswa merupakan representasi pimpinan perusahaan di masa mendatang, sehingga penggunaan mahasiswa dapat diandalkan. Beberapa penelitian juga menggunakan mahasiswa sebagai proxy investor (Elliot et al 2005; Hodge, Kennedy dan Maines 2004), dan proxy manajer/ eksekutif (Huerer dalam Kusuma, 2010). Cohen, Pant dan Sharp (2001) serta Ugrin (2008) memberikan dukungan tambahan untuk menggunakan mahasiswa akuntansi sebagai *proxy* akuntan profesional.

Dilihat dari latar belakang di atas maka peneliti ingin menguji kembali dengan sampel yang berbeda dari penelitian yang dilakukan oleh Kusuma (2010) berjudul: **“MENGUJI KUALITAS STANDAR AKUNTANSI HASIL ADOPTSI IFRS (Studi Empiris pada PSAK No. 55 Revisi 2006)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang muncul antara lain :

1. Apakah PSAK No. 55 (Revisi 2006) sulit dipahami oleh pemakai?
2. Apakah PSAK No. 55 (Revisi 2006) tidak memenuhi kriteria sebagai standar akuntansi yang berkualitas dari aspek isi (*content*) dan bahasa?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memberi bukti empiris tentang:

1. PSAK No. 55 (Revisi 2006) sulit dipahami oleh pemakai.
2. PSAK No. 55 (Revisi 2006) tidak memenuhi kriteria sebagai standar akuntansi yang berkualitas dari aspek isi (*content*) dan bahasa.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi-kontribusi dalam berbagai hal, seperti:

##### **1. Bidang teoritis**

- a. Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan standar akuntansi, terutama yang berkaitan dengan adopsi IFRS.
- b. Sebagai kontribusi bagi ilmu pengetahuan.

##### **2. Bidang praktis**

- a. Sebagai masukan bagi para penyusun standar akuntansi agar mempertimbangkan berbagai hal sehingga dapat menghasilkan standar akuntansi yang berkualitas.
- b. Mendukung dan memperbaiki penelitian sebelumnya tentang adopsi IFRS.